



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

KABUPATEN TAPIN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BID URUSAN ...	35
BAB V PENUTUP.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

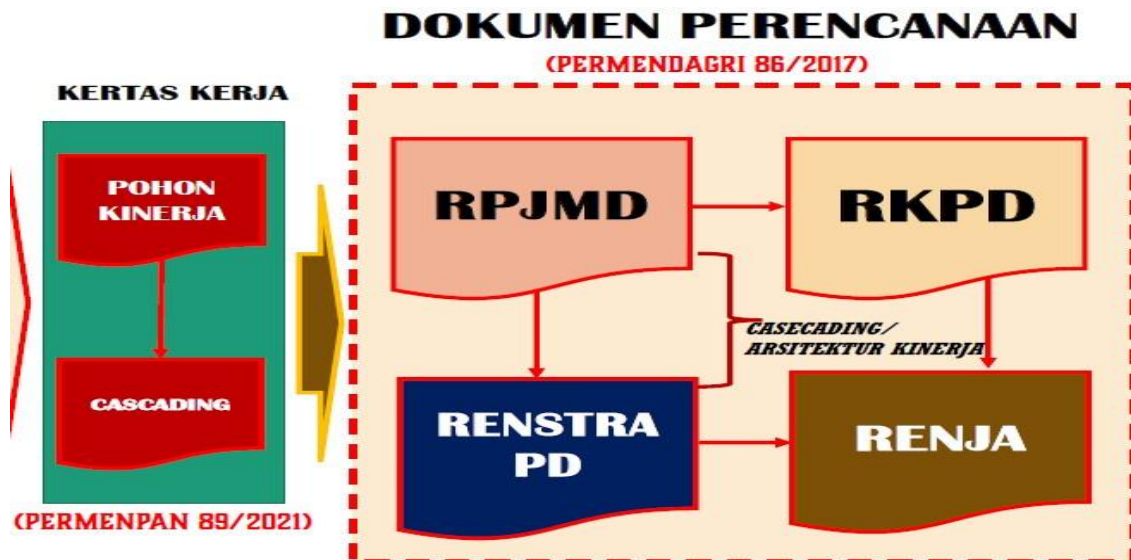
Inspektorat Kabupaten Tapin mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tapin tidak terlepas dari perencanaan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Perencanaan Inspektorat Kabupaten Tapin tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yakni suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Penyusunan Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Tapin berpedaoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



yang didalamnya memuat sasaran, strategi dan arah kebijakan pengawasan daerah. Rencana strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat yang pada penyusunannya memperhatikan perencanaan pengawasan ke depan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi antar instansi. Kerangka logis penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:



Mengingat peran dan fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapin. Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Inspektorat 2025-2029 adalah:

1. Penyusunan dokumen Renstra Inspektorat 2025-2029 adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder urusan pengawasan dalam melaksanakan program dan kegiatan mulai dari tahun 2025-2029.
2. Renstra ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 serta kebijakan pengawasan nasional.
3. Renstra ini juga menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat selama tahun 2025-2029 dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan,



penganggaran, evaluasi kinerja Inspektorat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat.
2. Memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja perangkat daerah.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan melalui perencanaan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.
4. Mewujudkan sinergi antara pengawasan intern daerah dengan kebijakan nasional dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
5. Menjadi dasar akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta mendukung evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin



2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Tapin, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Subbab ini juga memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia juga asset Inspektorat Kabupaten Tapin. Subbab ini juga menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah



Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan kesinambungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja



faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatornya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan dan rekomendasi perbaikan kedepan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat

2.1.1.1 Tugas Pokok

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kelola Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Inspektorat Kabupaten Tapin mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2.1.1.2 Fungsi

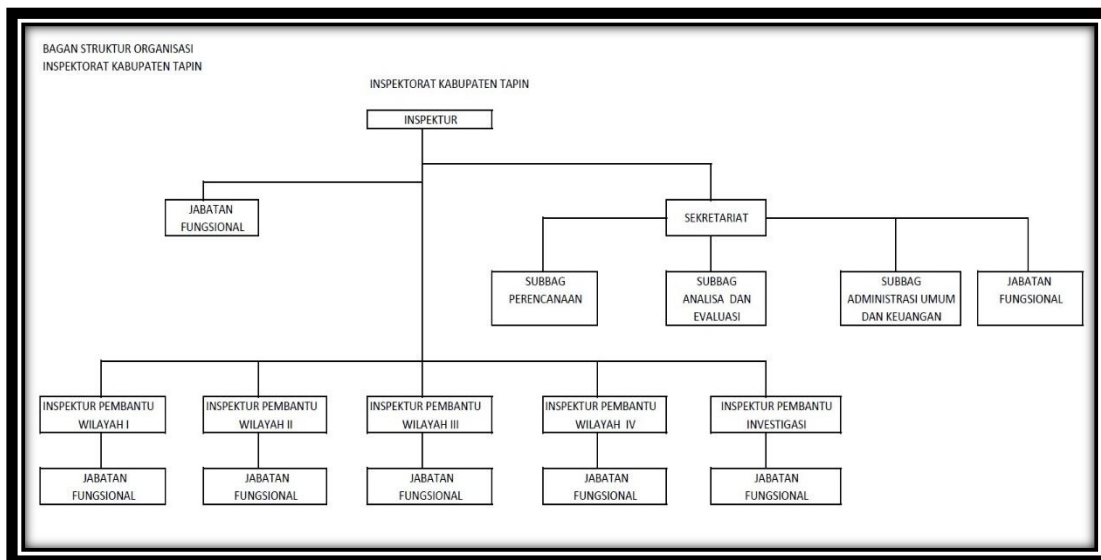
1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan pembinaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) daerah;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/daerah tanpa menunggu



penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat;

5. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
8. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
9. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Struktur Organisasi



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS di Inspektorat Kabupaten Tapin sejumlah 40 ASN (38 PNS dan 2 PPPK) informasi berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal per 31 Desember 2024**

No.	Pendidikan	Jumlah (PNS)
1.	S – 3	-
2.	S – 2	15
3.	S – 1	22
4.	D – IV	-
5.	D – III	3
6.	D – II	-
7.	D – I	-
8.	SLTA	-
9.	SLTP	-
10.	SD	-
	JML	40

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tapin

Klasifikasi menurut golongan kepegawaian disajikan dalam tabel berikut ini:

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Golongan per 31 Desember 2024

No.	Golongan	Jumlah 38 PNS
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	1
3.	Golongan III	19
4.	Golongan IV	18
No.	Golongan PPPK	Jumlah 2 PPPK
1.	Golongan IX	1
2.	Golongan VII	1

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tapin

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural disajikan dalam tabel berikut:

No.	Eselon	Jumlah (PNS)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	6
3.	Eselon IV	3
4.	Jabatan P2UPD	7
5.	Jabatan Fungsional Auditor	17
6.	Non Eselon/staf/Pelaksana	6
	JML	40

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tapin

**Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan pada Inspektorat Kabupaten Tapin per 31 Desember 2024**

No.	Satuan/ Unit kerja	Klasifikasi Pendidikan							Jml
		S3	S2	S1	D3	SMU	SLTP	SD	
1.	Inspektur		1						1
2.	Sekretaris		1						1
3.	Irbanwil		5						5
4.	Kasubag			3					3
5.	P2UPD		2	5					7
6.	Auditor		7	10					17
7.	Arsiparis			1					1
7.	Prakom				1				1
8.	Pelaksana			2	2				5
	J u m l a h		16	21	3				40

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tapin

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekenisme pencapaian target kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Daftar inventaris barang (sarana dan prasarana) yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Data Kendaraan pada Inspektorat Kabupaten Tapin Keadaan Desember 2024



No	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Jumlah
1	Sepeda Motor Honda /Win (MCB)	2003	5 Unit
2	Sepeda Motor Honda /NF 100L (Supra Fit)	2003	1 Unit
3	Mobil Suzuki/APV	2007	1 Unit
4	Mobil Toyota/ Inova	2010	1 Unit
5	Mobil Suzuki APV Arena/ GXAT	2013	2 Unit
6	Mobil Toyota/ Inova	2016	1 Unit
Jumlah			11 Unit

Adapun aset tetap Inspektorat Kabupaten Tapin terhitung sampai dengan 31 Desember 2024 sejumlah Rp 5.630.304.239 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Aset (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.433.922.093	2.759.944.978	2.770.762.799	3.002.491.194	3.956.421.194
3	Gedung dan Bangunan	1.312.986.545	1.312.986.545	1.312.986.545	1.661.558.545	1.661.558.545
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	12.324.500	12.324.500	12.324.500	12.324.500	12.324.500
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	-	-	172.142.279	-	-
8	Aset Lain-lain	67.803.902	12.532.100	172.142.279	-	-
	JML	3.759.233.138	4.085.256.023	4.096.073.844	4.904.320.563	5.630.304.239

2.1.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Kabupaten Tapin

Tahun	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	Persentase
2020	4.726.978.185	4.488.584.414	94,96
2021	11.662.248.016	10.249.604.200	87,88



2022	16.162.792.332	13.106.406.411	81,09
2023	17.845.840.426	14.852.907.88	83,23
2024	23.328.263.897	17.110.333.422	73,35

2.1.2.4 Standar Operasional dan Prosedur

Untuk memastikan konsistensi, efisiensi dan kualitas dalam pelaksanaan tugas serta meminimalkan kesalahan dan risiko yang mungkin timbul, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berikut SOP yang dimiliki Inspektorat sampai saat ini:

1. Penanganan pengaduan masyarakat
2. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
3. Pemeriksaan/ Audit Operasional
4. Pemeriksaan khusus
5. Pelaksanaan reviu
6. Evaluasi SAKIP
7. Penanganan atas penolakan pemeriksaan atau menolak menyampaikan data oleh obrik
8. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler
9. Penyusunan pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
10. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
11. Prosedur Penyusunan RKA
12. Prosedur Penyusunan DPA
13. Revisi Anggaran



2.1.2.5 Inovasi

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terkait tugas dan fungsi, Inspektorat membuat inovasi untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis yang dihadapi. Inovasi yang ada di Inspektorat antara lain:

1. SIPMANTAP (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Tapin)
2. Lapor GRAK (Layanan Pelaporan Gratifikasi)
3. MITRA DESA (Membina dan Melayani Komunikasi Aparat Desa)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Mengingat Inspektorat Kabupaten Tapin bukan merupakan unit pelayanan dasar, analisis pencapaian kinerja pelayanan diambil dari IKU dan IKK Inspektorat Kabupaten Tapin. Evaluasi capaian IKU dan IKK dapat dilihat pada tabel berikut:

Evaluasi IKU

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah	16,7 %				
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	88 %				
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	76,5 %				
Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	43,36%				
Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100 %				
Lavel kapabilitas pengawas intern minimal "Integrated" (Level 3)	Infrastuktur				



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Level maturitas Pemda Minimal “Terdefinisi” (Level 3)	Terdefinisi				
Opini Audit Eksternal atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin		WTP	WTP		
Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materiil		73.58%	95.55%		
Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin		B	B		
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin		Level 3	Level 3		
Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat		Level 2	Level 2		
Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK		85	85,18		
Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat minimal WBK		0	0		
Level Kapabilitas APIP		1.67	1.47	3	
Indeks Manajemen Risiko				91,26	
Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)				2,900	
Nilai SAKIP Inspektorat				72,7	
Indeks profesionalisme ASN (IP-ASN) Inspektorat				53	
Indeks Maturitas SPIP					3
Persentase Unit Kerja Pelayanan yang diusulkan WBK hingga penilaian TPN					100%
Nilai SAKIP Pemda					BB
Nilai LPPD					Tinggi
Opini Laporan Keuangan oleh BPK RI					WTP
Persentase Ketepatan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					100%
Persentase Capaian Target Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					87,92%



Evaluasi IKK

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	2	2	3	3
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat merujuk pada pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang menjadi fokus dari layanan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Inspektorat memiliki peran sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga layanan yang diberikan berkaitan dengan pengawasan, evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adapun kelompok sasaran layanan tersebut adalah:

1. Perangkat daerah atau unit kerja

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap kinerja, penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sasarannya mencakup dinas, badan, kantor dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Pimpinan daerah atau pimpinan instansi

Layanan berupa penyediaan informasi hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan, rekomendasi perbaikan tata kelola, dan mitigasi risiko kepada Bupati selaku Pimpinan Daerah.

3. Aparatur Sipil Negara

Sasaran dalam hal pembinaan disiplin, kepatuhan terhadap kode etik, serta pencegahan penyimpangan baik pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan pemerintahan.



4. Masyarakat atau Publik

Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Selain itu juga Secara tidak langsung, masyarakat adalah sasaran akhir dari layanan Inspektorat karena pengawasan bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik.

5. Badan pengawasan eksternal

Inspektorat menjadi mitra koordinasi, sehingga memberikan data/informasi atau menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga-lembaga pengawasan eksternal (BPK,KPK,BPKP,Irjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi)

6. Lembaga Perwakilan (DPRD)

Lembaga perwakilan rakyat dapat meminta laporan hasil pengawasan kepada Inspektorat dalam rangka akuntabilitas pemerintahan dan dapat menjadi bahan evaluasi oleh lembaga legeslatif.

7. Aparat Penegak Hukum (APH)

Aparat Penegak Hukum dapat meminta Inspektorat untuk menghitung jumlah kerugian daerah akibat tindak pidana yang terjadi.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Koordinasi dalam perencanaan pembangunan, integrasi pengawasan terhadap program/kegiatan prioritas serta Penyelarasan antara hasil pengawasan Inspektorat dengan perencanaan pembangunan daerah.



2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mitra dalam pengawasan manajemen kepegawaian, pelaksanaan kode etik ASN, dan pengembangan kompetensi ASN serta Penanganan pelanggaran disiplin ASN dan penyusunan rekomendasi pembinaan SDM.

3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Koordinasi dalam audit dan pengawasan pengelolaan keuangan serta aset daerah serta Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil audit Inspektorat.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika

Mendukung keterbukaan informasi publik dan penyediaan platform digital untuk pelaporan pengaduan masyarakat serta integrasi sistem pelaporan elektronik (SP4N-LAPOR)

5. Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Bagian Hukum)

Mendukung harmonisasi regulasi, SOP, dan kebijakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta Penyusunan kebijakan anti korupsi, reformasi birokrasi, dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

6. Perangkat daerah atau unit kerja

Objek pemeriksaan Inspektorat, mitra dalam pelaksanaan reviu, monitoring, dan evaluasi kinerja pelayanan publik serta Perbaikan tata kelola pelayanan publik melalui rekomendasi hasil pengawasan.

7. Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPKP, BPK

Koordinasi dalam pelaksanaan audit eksternal dan sinergi pengawasan serta Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan penguatan peran Inspektorat sebagai APIP.



2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Bank Tapin adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapin. Sebagai BUMD maka Bank Tapin merupakan entitas yang menjadi obrik pengawasan Inspektorat. Dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Inspektorat dapat diwujudkan dengan bentuk kolaborasi, fasilitasi dan kepatuhan terhadap pengawasan diantaranya adalah:

1. Kepatuhan terhadap pengawasan dan audit

Menerima dan mendukung kegiatan audit atau reviu dari Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Memberikan data dan dokumen secara terbuka dan tepat waktu, guna mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengawasan. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat, baik terkait tata kelola keuangan, manajemen risiko, maupun kepatuhan regulasi.

2. Kolaborasi dalam Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola

Penguatan komitmen anti korupsi, melalui pelaporan gratifikasi dan penerapan *whistleblowing System*

2.1.7 Kerjasama Yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Berdasarkan MoU tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang di tanda tangani Bupati Tapin, Kepala Kejaksaan Negeri Tapin dan Kepala Kepolisian Resor Tapin. Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah daerah, APIP dapat saling tukar menukar data dan/atau informasi atas laporan tersebut dengan APH. APIP menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigasi



untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana. Dalam melaksanakan pemeriksaan investigasi menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi APIP menyerahkan kepada APH untuk dilakukan penyidikan. Dalam hal APH menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat APH dapat menyerahkan kepada APIP.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan gap antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dapat mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah khususnya urusan pengawasan.

Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Tapin, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu global, nasional dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh



aspek, maka diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menuntukan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tapin.

Mengacu pada permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029, maka diidentifikasi permasalahan urusan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hasil penilaian atas komponen penetapan tujuan maturitas penyelenggaraan SPIP menjelaskan perlu ada perbaikan kinerja, indikator dan strategi pencapaian kinerja yang telah disusun agar memenuhi kriteria SMART. Hal ini sejalan dengan catatan dari KemenpanRB dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Tapin, dimana ditemukan beberapa target perjanjian kinerja kurang *challenging*/ menantang atau kurang realistis. Pohon kinerja juga cenderung masih terpaku/mengakomodir struktur organisasi yang dimiliki, sehingga belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi *Critical Succes Factor* (CSF) yang cukup sesuai permasalahan empirik yang dihadapi. Selain itu pohon kinerja belum sepenuhnya mampu menguraikan kinerja taktikal kepada kinerja operasional yang cukup. Perjanjian kinerja juga masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan kualitas kinerja antara satu pengampu dengan pengampu yang lain dilevel yang sama dimana satu kinerja mengawal sasaran berupa *intermediate/immediate outcome* namun ada PK dengan level yang sama mengawal sasaran yang terlalu operasional/*output*. Croscuting kinerja belum secara spesifik menyebutkan kontribusi yang dibebankan oleh SKPD pengampu. Pohon kinerja penanganan kemiskinan belum cukup untuk mendorong tercapainya kinerja taktikal



penanganan kemiskinan secara optimal. Atas permasalahan tersebut APIP dalam melakukan evaluasi internal harus dapat memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan perbaikan kinerja, indikator dan strategi pencapaian kinerja yang telah disusun agar memenuhi kriteria SMART.

Dalam penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin belum melaksanakan evaluasi terhadap efektifitas pengendalian dan pengelolaan risiko atas program dan kegiatan. Untuk mengatasi permasalahan ini Inspektorat harus berperan dalam penggerak implementasi SPIP di setiap perangkat daerah dengan melaksanakan sosialisasi pentingnya SPIP, pendampingan penyusunan identifikasi risiko dan penetapan respons risiko. Selain itu juga Inspektorat memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pengendalian intern di masing-masing perangkat daerah dan evaluasi kesesuaian antara pengendalian yang ditetapkan dengan risiko yang dihadapi.

Hasil penilaian maturitas SPIP atas komponen pencapaian tujuan menjelaskan masih tingginya risiko keterjadian korupsi. Hal ini sejalan dengan dengan hasil survei penilaian integritas pada Pemerintah Kabupaten Tapin 2024 yang berada di angka 72,47, menunjukan Pemerintah Kabupaten Tapin berada pada kategori rentan. Selain itu juga hasil evaluasi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) mengalami penurunan dengan hasil 2,652 dari tahun sebelumnya 2023 sebesar 2,900. Hasil SPI 2024 menemukan bahwa konflik kepentingan merupakan salah satu akar persoalan utama yang memicu berbagai penyimpangan dalam pengelolaan lembaga publik. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berupaya untuk memperbaiki integritas organisasi secara mandiri melalui aksi nyata dengan melakukan analisis mendalam terhadap akar persoalan dan mengembangkan mitigasi serta



mengimplementasikan secara konsisten. Aksi yang dikembangkan harus menjadi langkah strategis yang tajam, terukur dan berdampak nyata. Dirancang untuk memangkas risiko korupsi, memperkuat sistem pencegahan dan menghadirkan transformasi layanan publik yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat Kabupaten Tapin berdasarkan perhitungan resmi jumlah ideal APIP di Kabupaten Tapin oleh BPKP masih kekurangan SDM JFA sebanyak 78 Auditor dari formasi yang ada sebanyak 17 Auditor. Belum semua pejabat struktural khususnya pengambil kebijakan atau pengendali teknis pengawasan memiliki sertifikasi CGCAE (*Certified Government Chief Audit Executive*) yang merupakan sertifikasi di bidang audit pemerintah untuk memperkuat peran APIP dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Data risiko yang dibuat oleh SKPD masih belum mencerminkan risiko yang sebenarnya terjadi di SKPD tersebut dan belum dilaksanakan monitoring terhadap data risiko yang dibuat terkait kejadian dan efektifitas pengelolaan risiko yang telah direncanakan, sehingga membuat perencanaan pengawasan belum sepenuhnya dapat mengatasi risiko yang mungkin terjadi pada SKPD tersebut. Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan, hal tersebut dapat mengakibatkan efektivitas pengawasan tetap stagnan sehingga tujuan strategis organisasi sulit dicapai serta kontribusi Inspektorat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak maksimal. Formalitas dalam kerja sama dengan pihak lain perlu ditingkatkan melalui kerja sama atau MoU yang jelas dan struktur sehingga mekanisme dan pembagian tugas menjadi lebih efektif. Pedoman audit kinerja yang digunakan belum sesuai dengan pedoman umum audit kinerja berbasis risiko, hal ini menghambat penerapan audit berbasis risiko yang sistematis dan fokus pada area risiko tertinggi.



2.2.2 Isu Strategis

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Komitmen kepala daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	Tata kelola pemerintah	Penerapan prinsip-prinsip Good Governance kinerja pemerintahan	Tata kelo dan Akuntabilitas pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Sistem pengendalian intern pemerintah belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan
Penguatan lembaga APIP dari segi Anggaran	Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pelayanan dasar dan sumber daya manusia	Belum optimalnya kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan independen, profesional, dan bernilai tambah sesuai dengan standar <i>internal audit capability model</i> (IACM)	Belum optimalnya kualitas aktivitas dan hasil pengawasan yang memperkuat kontribusi dan dampak	Transformasi tata kelola dengan mengoptimalkan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM sektor publik	APIP masih berada pada level yang belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi assurance dan konsultasi secara efektif



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah inspektorat Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi pembangunan daerah yang aspiratif dan berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan rencana pembangunan Kabupaten Tapin yang maju dan beriman. Dalam rangka mencapai visi pembangunan, dirumuskan misi strategis yang akan menjadi panduan dalam setiap langkah pembangunan. Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran strategis merupakan tahapan krusial yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan serta capaian kinerja yang terukur dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan analisis visi, misi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang



ditetapkan relevan, terukur, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah serta regulasi nasional, digunakan teknik-teknik perumusan yang sistematis dan berbasis logika perencanaan. Tabel berikut menyajikan teknik yang digunakan dalam merumuskan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten:

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahunan						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perintah daerah		Nilai SAKIP	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
			Nilai LPPD	2,76	2,82	2,88	2,94	3,00	3,06	3,11	
			Nilai RB General	66,98	67,53	68,07	68,62	69,187	70,26	70,28	
			Nilai RB Tematik	9,29	9,37	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75	
Meningkatnya birokrasi yang berintegritas	Meningkatnya birokrasi yang berintegritas		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP KPK	89	89,52	90,05	90,57	91,10	91,62	92,14	
			Indeks Maturitas SPIP	3,15	3,25	3,34	3,24	3,51	3,60	3,69	
			Survei Penilaian Integritas	72,47	73,78	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perintah daerah		Meningkatnya nilai sakip perangkat daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A	33,33	90	92	94	96	98	100	
		Meningkatnya kualitas IKK LPPD di perangkat daerah	Persentase IKK sesuai pedoman	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi	87,92	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya birokrasi yang berintegritas		Meningkatnya nilai capaian area MCP KPK	Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman	89	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya nilai penjaminan kualitas maturitas SPIP	Nilai penjaminan kualitas SPIP	4,292	4,300	4,350	4,400	4,450	4,500	4,550	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahunan						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya penyusunan kebijakan anti korupsi	Persentase kebijakan anti korupsi yang ditetapkan sesuai rencana	100	100	100	100	100	100	100	

Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran renstra. Adapun penahapan renstra tahunan Inspektorat Kabupaten Tapin periode 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut:

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Penyusunan rencana aksi penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Pendampingan dan asistensi penerapan kinerja pemerintahan yang baik	1. Evaluasi pelaksanaan rencana aksi	1. Penguatan <i>coaching system</i> serta pemberian <i>reward and punishment</i>	1. Evaluasi capaian sasaran strategis, dokumentasi dan penyebarluasan <i>best practices</i> , rekomendasi kebijakan perencanaan lanjutan
2. <i>Mapping baseline</i> capaian MCP area pengawasan, penyusunan strategi pengawasan berbasis MCP KPK	2. Pelaksanaan pengawasan sesuai pedoman MCP area penguatan pengawasan	2. Monitoring dan revidu progress <i>action plan</i> serta efektifitas rekomendasi pengawasan	2. Evaluasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan MCP dan pemenuhan indikator MCP yang belum optimal, dokumentasi <i>success story</i> dan praktik baik	2. Evaluasi capaian indikator MCP area pengawasan, penyusunan rekomendasi strategi MCP selanjutnya.
3. Penguatan pemahaman dan komitmen pimpinan terhadap SPIP	3. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan pengendalian intern yang terstandar	3. Pendampingan implementasi SPIP terintegrasi dalam proses bisnis OPD	3. Monitoring, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas pengendalian intern	3. Evaluasi capaian konsolidasi praktik baik dan penyusunan <i>roadmap</i> SPIP selanjutnya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, penyusunan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapin menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang strategis dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah. Arah kebijakan ini dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta



penjabaran dari visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan arah kebijakan juga mempertimbangkan kebutuhan peningkatan kapabilitas APIP, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta dukungan terhadap reformasi birokrasi dan kinerja perangkat daerah. Berikut disajikan tabel teknik perumusan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko atau daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah	
			Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK termasuk audit kinerja	
		Peningkatan pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Pengawasan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan <i>Monitoring Center of Prevention</i> (MCP)	
			Peningkatan mutu pengawasan rutin Inspektorat (Reviu dokumen perencanaan, reviu laporan keuangan, reviu LPPD dan pengawasan keuangan desa)	
			Peningkatan kapabilitas APIP	



Untuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Visi: “Terwujudnya Tapin Maju dan Beriman (Berintegritas, Sejahtera, Inovatif, Agamis dan Berkelanjutan)”			
Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya nilai sakiP perangkat daerah	Peningkatan kualitas pendampingan Evaluasi SAKIP, Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi dengan Bapelitbang dan Bagian Organisasi sebagai bagian dari Tim SAKIP Kabupaten, Pemanfaatan teknologi Informasi dalam Evaluasi Kinerja	Mengedepankan pendekatan edukatif dan konsultatif dalam penerapan SAKIP perangkat daerah, memastikan keselarasan antara RPJMD, Renstra, Renja dan PK, melakukan reviu terhadap indikator dan target kinerja agar sesuai dengan kriteria SMART, penguatan SDM Evaluator SAKIP, Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan terkait implementasi SAKIP di perangkat daerah, optimalisasi tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP
	Meningkatnya kualitas IKK LPPD di Perangkat Daerah	Melakukan evaluasi capaian IKK dan reviu LPPD, pelatihan dan sertifikasi APIP dalam reviu LPPD, pendampingan dan asistensi teknis dalam penyusunan dokumen dan capaian IKK LPPD, mendorong perangkat daerah melakukan self assessment atas IKK masing-masing, optimalisasi sistem aplikasi untuk pelaporan dan pemantauan capaian kinerja IKK (e-LPPD), meningkatkan sinergi dengan Bagian Pemerintahan dalam memaksimalkan capaian IKK perangkat daerah	Memposisikan APIP sebagai mitra perangkat daerah yang tadinya lebih kepada pengawasan dari aspek kepatuhan beralih ke arah kinerja dan tata kelola, mendorong perangkat daerah membangun sistem pengendalian untuk menjamin pencapaian indikator LPPD, menetapkan prioritas pengawasan pada perangkat daerah dengan capaian IKK yang rendah atau bermasalah, monitoring efektivitas tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dalam reviu LPPD



	Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi RB perangkat daerah, memastikan integrasi RB dengan program kerja masing-masing perangkat daerah, peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP dalam monitoring dan evaluasi RB, koordinasi dan sinergi baik dengan tim RB maupun stakeholder RB perangkat daerah pengampu indikator RB, mendorong peran serta aktif pimpinan daerah dalam memimpin pelaksanaan RB.	Mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan RB sebagai dasar pengambilan keputusan strategis kepala daerah dalam penataan birokrasi.
Meningkatnya birokrasi yang berintegritas	Meningkatnya nilai area pengawasan APIP MCP KPK	Penguatan kompetensi SDM APIP melalui pelatihan teknis, sertifikasi dan pendampingan berkelanjutan, menyusun PKPT yang selaras dengan risiko strategis daerah dan prioritas pengawasan KPK, memastikan pelaksanaan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan dilakukan secara tepat sasaran dan berdampak, mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil audit internal dan eksternal, menjalin kerja sama dengan APIP lain, BPKP dan KPK untuk penguatan pengawasan tematiuk dan pencegahan korupsi.	Mendorong perbaikan kualitas LHP yang sesuai standar, menguatkan mekanisme pelaporan capaian pengawasan secara berkala, berbasis data valid dan update, menyusun laporan evaluasi area MCP yang memuat capaian dan rekomendasi perbaikan tiap triwulan, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait implementasi area MCP.
	Meningkatnya nilai penjamin kualitas maturitas SPIP	Melaksanakan reviu atas pelaksanaan SPIP perangkat daerah secara berkala, mendorong perangkat daerah menyusun dan mengimplementasikan rencana tindak lanjut atas hasil evaluasi SPIP,	Penguatan fungsi <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> APIP terhadap implementasi SPIP, mendorong kemandirian OPD dalam melakukan penilaian dan peningkatan pengendalian intern, meningkatkan mutu pelaporan maturitas SPIP



		menyediakan asistensi teknis dan pendampingan pelaksanaan SPIP di perangkat daerah, menjalin koordinasi dengan BPKP dalam penilaian maturitas SPIP dan pembinaan teknis, mengembangkan sinergi antara perangkat daerah, inspektorat dan tim SPIP Kabupaten.	sesuai pedoman BPKP, memastikan SDM cukup untuk pelaksanaan evaluasi dan pendampingan SPIP, menjadikan hasil penilaian risiko dan SPIP sebagai dasar dalam penyusunan PKPT.
	Meningkatnya penyusunan kebijakan anti korupsi	Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas APIP dalam mengawal penyusunan dan implementasi kebijakan anti korupsi, Membangun sinergi antara Inspektorat, OPD, KPK, BPKP, dan lembaga terkait untuk mendukung harmonisasi dan integrasi kebijakan anti korupsi,	Menyusun pedoman teknis dan indikator kinerja penyusunan kebijakan anti korupsi agar selaras dengan rencana aksi nasional maupun instrumen pengawasan seperti MCP KPK, Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye antikorupsi untuk memperkuat pemahaman dan komitmen ASN dalam mendukung kebijakan pencegahan korupsi.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya mencapai sasaran menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin tapin 2025-2029, maka langkah operasionalnya adalah menuangkan ke dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Setiap program tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan. Kegiatan subkegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian target organisasi. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin, diperlukan pendekatan yang sistematis dan selaras dengan tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan. Proses perumusan dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan strategis yang dihadapi, arah kebijakan yang dirancang, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain itu, program dan kegiatan juga harus mendukung peningkatan kapasitas pengawasan, efektivitas pengendalian intern, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Tabel berikut menyajikan teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan yang digunakan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan operasional Inspektorat Kabupaten secara berkelanjutan.



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				Nilai SAKIP (poin)		
					Nilai LPPD (poin)		
					Nilai RB General (poin)		
					Nilai RB Tematik (poin)		
		Meningkatnya nilai sakip perangkat daerah			Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, laporan dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya PKPT	Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	



				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya kualitas IKK LPPD di Perangkat Daerah			Persentase IKK sesuai pedoman		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya PKPT	Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	



					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	



		Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi			Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi		
					Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksana Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai rencana	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	



					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
Meningkatnya birokrasi yang berintegritas	Meningkatnya birokrasi yang berintegritas				Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) (Indeks)		
					Indeks Maturitas SPIP (Nilai)		
					Survey Penilaian Integritas (poin)		
		Meningkatnya nilai capaian area MCP KPK			Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman (%)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	



				Terlaksananya PKPT	Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	



					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya nilai penjaminan kualitas maturitas SPIP			Nilai penjaminan kualitas SPIP		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya PKPT	Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	



					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya Kapabilitas APIP		Level Kapabilitas APIP	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	



					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	



					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	



					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tepat waktu	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	



					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	



					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	



						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya PKPT	Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	



					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas		Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	



			pendampingan dan asistensi			PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksana Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai rencana	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	



					Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	



			6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			6.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan	



			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			6.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			6.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	



			6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	



			6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



			6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	



			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	



Rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pendanaan:

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				26.132.902.153,00		27.493.932.286,00		27.566.655.704,00		29.781.760.839,00		30.785.070.666,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.698.927.323,00		19.666.271.605,00		20.469.375.357,00		21.219.729.424,00		21.937.070.145,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	85,95	87	3.540.800,00	88	3.753.248,00	89	3.893.377,00	90	4.098.546,00	91	4.303.474,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.540.800,00		3.753.248,00		3.903.377,00		4.098.546,00		4.303.474,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	558.000,00	1	591.480,00	1	615.139,00	1	645.896,00	1	678.191,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	558.000,00	1	591.480,00	1	615.139,00	1	645.896,00	1	678.191,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2	2	758.000,00	2	803.480,00	2	835.619,00	2	877.400,00	2	921.270,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	



	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	498.000,00	4	527.880,00	4	548.995,00	4	576.445,00	4	605.267,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	298.000,00	1	315.880,00	1	328.515,00	1	344.941,00	1	362.188,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	572.800,00	2	607.168,00	2	631.455,00	2	663.027,00	2	696.179,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	298.000,00	1	315.880,00	1	328.515,00	1	344.941,00	1	362.188,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				572.800,00		607.168,00		631.455,00		663.027,00		696.179,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	572.800,00	2	607.168,00	2	631.455,00	2	663.027,00	2	696.179,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				558.000,00		591.480,00		615.139,00		645.896,00		678.191,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	558.000,00	1	591.480,00	1	615.139,00	1	645.896,00	1	678.191,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				558.000,00		591.480,00		615.139,00		645.896,00		678.191,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	558.000,00	1	591.480,00	1	615.139,00	1	645.896,00	1	678.191,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				298.000,00		315.880,00		328.515,00		344.941,00		362.188,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	298.000,00	1	315.880,00	1	328.515,00	1	344.941,00	1	362.188,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				298.000,00		315.880,00		328.515,00		344.941,00		362.188,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	298.000,00	1	315.880,00	1	328.515,00	1	344.941,00	1	362.188,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				758.000,00		803.480,00		835.619,00		877.400,00		921.270,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	758.000,00	2	803.480,00	2	835.619,00	2	877.400,00	2	921.270,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				498.000,00		527.880,00		548.995,00		576.445,00		605.267,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	498.000,00	4	527.880,00	4	548.995,00	4	576.445,00	4	605.267,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Meningkatnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Level penilaian mandiri kapabilitas APIP	3	3	18.698.927.323,00	3	19.666.271.605,00	3	20.469.375.357,00	3	21.219.729.424,00	3	21.937.070.145,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.696.607.795,00		11.338.368.263,00		11.791.940.434,00		12.381.537.454,00		13.000.614.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	738.300,00	2	782.598,00	2	813.902,00	2	854.597,00	2	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		40	738.300,00	40	782.598,00	40	813.902,00	40	854.597,00	40	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	738.300,00	12	782.598,00	12	813.902,00	12	854.597,00	12	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis		1	4.181.600,00	1	4.432.496,00	1	4.609.796,00	1	4.840.286,00	1	5.082.300,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



	Realisasi Anggaran													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	106.400.000,00	12	112.748.000,00	12	117.295.360,00	12	123.160.128,00	12	129.318.134,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.195.000,00	1	5.506.700,00	1	5.726.968,00	1	6.013.316,00	1	6.313.982,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	4.995.000,00	12	5.294.700,00	12	5.506.488,00	12	5.781.812,00	12	6.070.903,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	10.573.621.295,00	40	11.208.038.573,00	40	11.656.360.116,00	40	12.239.178.121,00	40	12.851.137.027,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.573.621.295,00		11.208.038.573,00		11.656.360.116,00		12.239.178.121,00		12.851.137.027,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	10.573.621.295,00	40	11.208.038.573,00	40	11.656.360.116,00	40	12.239.178.121,00	40	12.851.137.027,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan		40	738.300,00	40	782.598,00	40	813.902,00	40	854.597,00	40	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				106.400.000,00		112.748.000,00		117.295.360,00		123.160.128,00		129.318.134,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	106.400.000,00	12	112.748.000,00	12	117.295.360,00	12	123.160.128,00	12	129.318.134,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12	738.300,00	12	782.598,00	12	813.902,00	12	854.597,00	12	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.195.000,00		5.506.700,00		5.726.968,00		6.013.316,00		6.313.982,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.195.000,00	1	5.506.700,00	1	5.726.968,00	1	6.013.316,00	1	6.313.982,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	738.300,00	2	782.598,00	2	813.902,00	2	854.597,00	2	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Renstra 2025-2029

6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4.995.000,00		5.294.700,00		5.506.488,00		5.781.812,00		6.070.903,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	4.995.000,00	12	5.294.700,00	12	5.506.488,00	12	5.781.812,00	12	6.070.903,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.181.600,00		4.432.496,00		4.609.796,00		4.840.286,00		5.082.300,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	4.181.600,00	1	4.432.496,00	1	4.609.796,00	1	4.840.286,00	1	5.082.300,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.938.700,00		7.355.022,00		7.649.223,00		8.031.684,00		8.433.269,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	3.247.200,00	1	3.442.032,00	1	3.579.713,00	1	3.758.699,00	1	3.946.634,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



6.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.247.200,00		3.442.032,00		3.579.713,00		3.758.699,00		3.946.634,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	3.247.200,00	1	3.442.032,00	1	3.579.713,00	1	3.758.699,00	1	3.946.634,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.445.531.717,00		2.442.837.735,00		2.605.386.339,00		2.635.655.657,00		2.502.418.028,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54	54	86.873.500,00	54	92.085.910,00	54	95.769.346,00	54	100.557.814,00	54	105.585.704,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40	40	83.678.400,00	40	88.699.104,00	40	92.247.068,00	40	96.859.422,00	40	101.702.393,00	6.01.0.00.0.00.01. 0000 - Inspektorat	



	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		40	738.300,00	40	782.598,00	40	813.902,00	40	854.597,00	40	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	1.232.372.812,00	40	1.031.890.254,00	40	1.138.000.959,00	40	1.194.901.007,00	40	884.625.646,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	40	1.041.868.705,00	40	1.229.379.869,00	40	1.278.555.064,00	40	1.242.482.817,00	40	1.409.606.958,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				86.873.500,00		92.085.910,00		95.769.346,00		100.557.814,00		105.585.704,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54	54	86.873.500,00	54	92.085.910,00	54	95.769.346,00	54	100.557.814,00	54	105.585.704,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		40	738.300,00	40	782.598,00	40	813.902,00	40	854.597,00	40	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				83.678.400,00		88.699.104,00		92.247.068,00		96.859.422,00		101.702.393,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40	40	83.678.400,00	40	88.699.104,00	40	92.247.068,00	40	96.859.422,00	40	101.702.393,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.041.868.705,00		1.229.379.869,00		1.278.555.064,00		1.242.482.817,00		1.409.606.958,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	40	1.041.868.705,00	40	1.229.379.869,00	40	1.278.555.064,00	40	1.242.482.817,00	40	1.409.606.958,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.232.372.812,00		1.031.890.254,00		1.138.000.959,00		1.194.901.007,00		884.625.646,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	1.232.372.812,00	40	1.031.890.254,00	40	1.138.000.959,00	40	1.194.901.007,00	40	884.625.646,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.957.912.319,00		3.135.387.058,00		3.215.802.540,00		3.207.752.528,00		3.293.789.375,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	103.921.600,00	12	110.156.896,00	12	114.563.172,00	12	120.291.330,00	12	126.305.897,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	2.052.797.650,00	12	2.175.965.509,00	12	2.218.004.129,00	12	2.160.064.196,00	12	2.193.716.627,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	618.749.540,00	12	655.874.512,00	12	682.109.493,00	12	716.214.968,00	12	752.025.716,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan		1	15.173.429,00	1	16.083.835,00	1	16.727.188,00	1	17.563.548,00	1	18.441.725,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	61.054.300,00	12	64.717.558,00	12	67.306.260,00	12	70.671.573,00	12	74.205.152,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	9.908.900,00	12	10.503.434,00	12	10.923.571,00	12	11.469.750,00	12	12.043.237,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	60.953.200,00	12	64.610.392,00	12	67.194.808,00	12	70.554.548,00	12	74.082.275,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	34.615.400,00	2	36.692.324,00	2	38.160.017,00	2	40.068.018,00	2	42.071.419,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.615.400,00		36.692.324,00		38.160.017,00		40.068.018,00		42.071.419,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	34.615.400,00	2	36.692.324,00	2	38.160.017,00	2	40.068.018,00	2	42.071.419,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				103.921.600,00		110.156.896,00		114.563.172,00		120.291.330,00		126.305.897,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	103.921.600,00	12	110.156.896,00	12	114.563.172,00	12	120.291.330,00	12	126.305.897,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.908.900,00		10.503.434,00		10.923.571,00		11.469.750,00		12.043.237,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	9.908.900,00	12	10.503.434,00	12	10.923.571,00	12	11.469.750,00	12	12.043.237,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				618.749.540,00		655.874.512,00		682.109.493,00		716.214.968,00		752.025.716,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	618.749.540,00	12	655.874.512,00	12	682.109.493,00	12	716.214.968,00	12	752.025.716,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.953.200,00		64.610.392,00		67.194.808,00		70.554.548,00		74.082.275,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	60.953.200,00	12	64.610.392,00	12	67.194.808,00	12	70.554.548,00	12	74.082.275,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				61.054.300,00		64.717.558,00		67.306.260,00		70.671.573,00		74.205.152,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	61.054.300,00	12	64.717.558,00	12	67.306.260,00	12	70.671.573,00	12	74.205.152,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.052.797.650,00		2.175.965.509,00		2.218.004.129,00		2.160.064.196,00		2.193.716.627,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	2.052.797.650,00	12	2.175.965.509,00	12	2.218.004.129,00	12	2.160.064.196,00	12	2.193.716.627,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.173.429,00		16.083.835,00		16.727.188,00		17.563.548,00		18.441.725,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	15.173.429,00	1	16.083.835,00	1	16.727.188,00	1	17.563.548,00	1	18.441.725,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.881.135.413,00		1.994.003.537,00		2.073.763.679,00		2.177.451.863,00		2.286.324.456,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20	90.242.973,00	30	95.657.551,00	40	99.483.853,00	50	104.458.046,00	60	109.680.948,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	30	258.892.440,00	40	274.425.986,00	50	285.403.026,00	60	299.673.177,00	70	314.656.836,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	191.500.000,00	1	202.990.000,00	1	211.109.600,00	1	221.665.080,00	1	232.748.334,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		7	1.340.500.000,00	7	1.420.930.000,00	7	1.477.767.200,00	7	1.551.655.560,00	7	1.629.238.338,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				191.500.000,00		202.990.000,00		211.109.600,00		221.665.080,00		232.748.334,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	191.500.000,00	1	202.990.000,00	1	211.109.600,00	1	221.665.080,00	1	232.748.334,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas				1.340.500.000,00		1.420.930.000,00		1.477.767.200,00		1.551.655.560,00		1.629.238.338,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		7	1.340.500.000,00	7	1.420.930.000,00	7	1.477.767.200,00	7	1.551.655.560,00	7	1.629.238.338,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				90.242.973,00		95.657.551,00		99.483.853,00		104.458.046,00		109.680.948,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20	90.242.973,00	30	95.657.551,00	40	99.483.853,00	50	104.458.046,00	60	109.680.948,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				258.892.440,00		274.425.986,00		285.403.026,00		299.673.177,00		314.656.836,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	30	258.892.440,00	40	274.425.986,00	50	285.403.026,00	60	299.673.177,00	70	314.656.836,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.617.461,00		258.234.509,00		268.563.890,00		281.992.084,00		296.091.687,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	82.171.500,00	12	87.101.790,00	12	90.585.862,00	12	95.115.155,00	12	99.870.912,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	7.365.281,00	12	7.807.198,00	12	8.119.486,00	12	8.525.460,00	12	8.951.733,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	154.080.680,00	12	163.325.521,00	12	169.858.542,00	12	178.351.469,00	12	187.269.042,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.365.281,00		7.807.198,00		8.119.486,00		8.525.460,00		8.951.733,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	7.365.281,00	12	7.807.198,00	12	8.119.486,00	12	8.525.460,00	12	8.951.733,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				154.080.680,00		163.325.521,00		169.858.542,00		178.351.469,00		187.269.042,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Renstra 2025-2029

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	154.080.680,00	12	163.325.521,00	12	169.858.542,00	12	178.351.469,00	12	187.269.042,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				82.171.500,00		87.101.790,00		90.585.862,00		95.115.155,00		99.870.912,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	82.171.500,00	12	87.101.790,00	12	90.585.862,00	12	95.115.155,00	12	99.870.912,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				463.643.118,00		486.332.233,00		502.365.875,00		523.209.608,00		545.095.529,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	217.791.800,00	1	230.859.308,00	1	240.093.680,00	1	252.098.364,00	1	264.703.283,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	108.753.550,00	1	115.278.763,00	1	119.889.914,00	1	125.884.409,00	1	132.178.630,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	90	51.606.568,00	95	54.702.962,00	100	56.891.081,00	105	59.735.635,00	110	62.722.416,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				108.753.550,00		115.278.763,00		119.889.914,00		125.884.409,00		132.178.630,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	108.753.550,00	1	115.278.763,00	1	119.889.914,00	1	125.884.409,00	1	132.178.630,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				217.791.800,00		230.859.308,00		240.093.680,00		252.098.364,00		264.703.283,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	217.791.800,00	1	230.859.308,00	1	240.093.680,00	1	252.098.364,00	1	264.703.283,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.606.568,00		54.702.962,00		56.891.081,00		59.735.635,00		62.722.416,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	90	51.606.568,00	95	54.702.962,00	100	56.891.081,00	105	59.735.635,00	110	62.722.416,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				85.491.200,00		85.491.200,00		85.491.200,00		85.491.200,00		85.491.200,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



	Dipelihara/Direhabilitasi													
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5.723.641.550,00		6.014.707.404,00		6.220.393.940,00		6.487.786.436,00		6.768.548.559,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	100	100	5.723.641.550,00	100	6.014.707.404,00	100	6.220.393.940,00	100	6.487.786.436,00	100	6.768.548.559,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				4.580.917.620,00		4.855.772.678,00		5.050.003.585,00		5.302.503.763,00		5.567.628.953,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya PKPT	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1	226.600.280,00	1	240.196.297,00	1	249.804.149,00	1	262.294.356,00	1	275.409.074,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12	17	469.911.830,00	19	498.106.540,00	21	518.030.801,00	23	543.932.341,00	25	571.128.959,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	2	226.600.280,00	2	240.196.297,00	2	249.804.149,00	2	262.294.356,00	2	275.409.074,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82	82	1.574.994.260,00	82	1.669.493.916,00	82	1.736.273.672,00	82	1.823.087.356,00	82	1.914.241.724,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	40	734.636.950,00	40	778.715.167,00	40	809.863.774,00	40	850.356.962,00	40	892.874.810,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22	12	750.783.690,00	12	795.830.711,00	12	827.663.940,00	12	869.047.137,00	12	912.499.494,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	82	82	597.390.330,00	82	633.233.750,00	82	658.563.100,00	82	691.491.255,00	82	726.065.818,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



	Hasil Pemeriksaan APIP													
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.574.994.260,00		1.669.493.916,00		1.736.273.672,00		1.823.087.356,00		1.914.241.724,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82	82	1.574.994.260,00	82	1.669.493.916,00	82	1.736.273.672,00	82	1.823.087.356,00	82	1.914.241.724,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				734.636.950,00		778.715.167,00		809.863.774,00		850.356.962,00		892.874.810,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40	40	734.636.950,00	40	778.715.167,00	40	809.863.774,00	40	850.356.962,00	40	892.874.810,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				469.911.830,00		498.106.540,00		518.030.801,00		543.932.341,00		571.128.959,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12	17	469.911.830,00	19	498.106.540,00	21	518.030.801,00	23	543.932.341,00	25	571.128.959,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				226.600.280,00		240.196.297,00		249.804.149,00		262.294.356,00		275.409.074,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	2	226.600.280,00	2	240.196.297,00	2	249.804.149,00	2	262.294.356,00	2	275.409.074,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				750.783.690,00		795.830.711,00		827.663.940,00		869.047.137,00		912.499.494,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22	12	750.783.690,00	12	795.830.711,00	12	827.663.940,00	12	869.047.137,00	12	912.499.494,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				226.600.280,00		240.196.297,00		249.804.149,00		262.294.356,00		275.409.074,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1	226.600.280,00	1	240.196.297,00	1	249.804.149,00	1	262.294.356,00	1	275.409.074,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				597.390.330,00		633.233.750,00		658.563.100,00		691.491.255,00		726.065.818,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	82	82	597.390.330,00	82	633.233.750,00	82	658.563.100,00	82	691.491.255,00	82	726.065.818,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1.142.723.930,00		1.158.934.726,00		1.170.390.355,00		1.185.282.673,00		1.200.919.606,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	1	270.179.930,00	1	286.390.726,00	1	297.846.355,00	1	312.738.673,00	1	328.375.606,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				270.179.930,00		286.390.726,00		297.846.355,00		312.738.673,00		328.375.606,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	1	270.179.930,00	1	286.390.726,00	1	297.846.355,00	1	312.738.673,00	1	328.375.606,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				872.544.000,00		872.544.000,00		872.544.000,00		872.544.000,00		872.544.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	19	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.710.333.280,00		1.812.953.277,00		876.886.407,00		2.074.244.979,00		2.079.451.962,00		
Meningkatnya tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi	Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan	100	100	1.710.333.280,00	100	1.812.953.277,00	100	876.886.407,00	100	2.074.244.979,00	100	2.079.451.962,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				29.404.020,00		31.168.261,00		32.414.991,00		34.035.741,00		35.737.529,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	1	2.158.000,00	1	2.287.480,00	1	2.378.979,00	1	2.497.928,00	1	2.622.825,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	27.246.020,00	1	28.880.781,00	1	30.036.012,00	1	31.537.813,00	1	33.114.704,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				27.246.020,00		28.880.781,00		30.036.012,00		31.537.813,00		33.114.704,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	27.246.020,00	1	28.880.781,00	1	30.036.012,00	1	31.537.813,00	1	33.114.704,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				2.158.000,00		2.287.480,00		2.378.979,00		2.497.928,00		2.622.825,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	1	1	2.158.000,00	1	2.287.480,00	1	2.378.979,00	1	2.497.928,00	1	2.622.825,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



	Pengawasan yang Disusun													
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.680.929.260,00		1.781.785.016,00		844.471.416,00		2.040.209.238,00		2.043.714.433,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	5	1.107.265.200,00	5	1.173.701.112,00	5	122.064.156,00	5	1.281.681.614,00	5	1.345.160.428,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	6	245.039.000,00	6	259.741.340,00	6	360.130.994,00	6	378.137.544,00	6	300.044.421,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18	18	190.032.000,00	18	201.433.920,00	18	209.491.277,00	18	219.965.841,00	18	230.064.133,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	138.593.060,00	12	146.908.644,00	12	152.784.989,00	12	160.424.239,00	12	168.445.451,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				138.593.060,00		146.908.644,00		152.784.989,00		160.424.239,00		168.445.451,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	138.593.060,00	12	146.908.644,00	12	152.784.989,00	12	160.424.239,00	12	168.445.451,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				190.032.000,00		201.433.920,00		209.491.277,00		219.965.841,00		230.064.133,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18	18	190.032.000,00	18	201.433.920,00	18	209.491.277,00	18	219.965.841,00	18	230.064.133,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.107.265.200,00		1.173.701.112,00		122.064.156,00		1.281.681.614,00		1.345.160.428,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	5	1.107.265.200,00	5	1.173.701.112,00	5	122.064.156,00	5	1.281.681.614,00	5	1.345.160.428,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				245.039.000,00		259.741.340,00		360.130.994,00		378.137.544,00		300.044.421,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	6	6	245.039.000,00	6	259.741.340,00	6	360.130.994,00	6	378.137.544,00	6	300.044.421,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	



	Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Persentase IKK sesuai pedoman	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman	%	89	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai penjaminan kualitas SPIP	Angka	4,29	4,3	4,35	4,4	4,45	4,5	4,55	
4.	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A	%	33,33	90	92	94	96	98	100	
5.	Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase kebijakan anti korupsi yang ditetapkan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi	%	87,92	100	100	100	100	100	100	



Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Tapin

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	Level Kapabilitas APIP	positif	Level	3	3	3	3	3	4	4	
2.	Indeks Maturitas SPIP	positif	Nilai	3.15	3.25	3.34	3.42	3.51	3.60	3.69	

Kinerja renstra perangkat daerah urusan pengawasan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		
INDIKATOR	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET
Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangannya	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk melanjutkan berbagai kebijakan bidang pengawasan urusan pemerintahan sesuai permasalahan dan isu strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas kelembagaan dan Sumber daya Inspektorat. Keberhasilan implementasi Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh semua unsur Inspektorat Kabupaten Tapin. Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029. Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapin dalam menjalankan urusan pengawasan. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Inspektorat yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, *stakeholders* dan dukungan seluruh komponen organisasi. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami dinamika perubahan, maka Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan



wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran Inspektorat Kabupaten Tapin sangat diharapkan.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Inspektorat. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Inspektorat sebagai unit kerja pengawasan yang mampu memberikan *Early Warning System*, yang dapat mendeteksi permasalahan dan memberikan solusi penyelesaiannya. Semoga Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.



TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat											
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya birokrasi yang berintegritas	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya birokrasi yang berintegritas		Nilai SAKIP (poin)	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
			Nilai LPPD (poin)	-	3,10	3,25	3,30	3,50	3,55	3,60	
			Nilai RB General (poin)	66,98	67,53	68,07	68,62	69,18	70,26	71	
			Nilai RB Tematik (poin)	9,29	9,37	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75	
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) (Indeks)	89	90	91,01	92,03	930,7	94,11	95,17	
			Indeks Maturitas SPIP (Nilai)	3,15	3,25	3,34	3,42	3,51	3,60	3,69	
			Survey Penilaian Integritas (poin)	72,47	73,78	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34	
		Meningkatnya nilai sakip perangkat daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A (%)	33,33	90	92	94	96	98	100	
		Meningkatnya kualitas IKK LPPD di Perangkat Daerah	Persentase IKK sesuai pedoman (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi (%)	87,92	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya nilai capaian area MCP KPK	Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman (%)	89	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya nilai penjaminan kualitas maturitas SPIP	Nilai penjaminan kualitas SPIP (Angka)	4,292	4,300	4,350	4,400	4,450	4,500	4,550	
		Meningkatnya penyusunan kebijakan anti korupsi	Persentase kebijakan anti korupsi yang ditetapkan sesuai rencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.132.902.153,00		27.493.932.286,00		27.566.655.704,00		29.781.760.839,00		30.785.070.666,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.698.927.323,00		19.666.271.605,00		20.469.375.357,00		21.219.729.424,00		21.937.070.145,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	85,95	86	87	3.540.800,00	88	3.753.248,00	89	3.893.377,00	90	4.098.546,00	91	4.303.474,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas apip (Level)	3	3	3	18.695.386.523,00	3	19.662.518.357,00	3	20.465.481.980,00	4	21.215.630.878,00	4	21.932.766.671,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					5.723.641.550,00		6.014.707.404,00		6.220.393.940,00		6.487.786.436,00		6.768.548.559,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	77,58	100	100	5.723.641.550,00	100	6.014.707.404,00	100	6.220.393.940,00	100	6.487.786.436,00	100	6.768.548.559,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.710.333.280,00		1.812.953.277,00		876.886.407,00		2.074.244.979,00		2.079.451.962,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan (%)	100	100	100	1.710.333.280,00	100	1.812.953.277,00	100	876.886.407,00	100	2.074.244.979,00	100	2.079.451.962,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					26132902153.00		27493932286.00		27566655704.00		29781760839.00		30785070666.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat							
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya birokrasi yang berintegritas	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya birokrasi yang berintegritas				Nilai SAKIP (poin)		
					Nilai LPPD (poin)		
					Nilai RB General (poin)		
					Nilai RB Tematik (poin)		
					Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) (Indeks)		
					Indeks Maturitas SPIP (Nilai)		
					Survey Penilaian Integritas (poin)		
		Meningkatnya nilai sakip perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A (%)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya PKPT	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Persentase IKK sesuai pedoman (%)		
		Meningkatnya kualitas IKK LPPD di Perangkat Daerah					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya PKPT	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi			Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi (%)		
					Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi (%)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Terlaksanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya nilai capaian area MCP KPK			Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman (%)		
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Terlaksananya PKPT	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya nilai penjaminan kualitas maturitas SPIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP		Nilai penjaminan kualitas SPIP (Angka)		
					Level kapabilitas apip (Level)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya PKPT	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya penyusunan kebijakan anti korupsi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase kebijakan anti korupsi yang ditetapkan sesuai rencana (%)		
					Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Nilai LPPD	poin	-	3,10	3,25	3,30	3,50	3,55	3,60	
2	Nilai RB General	poin	66,98	67,53	68,07	68,62	69,18	70,26	71	
3	Nilai RB Tematik	poin	9,29	9,37	9,44	9,52	9,59	9,67	9,75	
4	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	Indeks	89	90	91,01	92,03	930,7	94,11	95,17	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,15	3,25	3,34	3,42	3,51	3,60	3,69	
2	Survey Penilaian Integritas	poin	72,47	73,78	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34	
3	Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A	%	33,33	90	92	94	96	98	100	
5	Persentase IKK sesuai pedoman	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman	%	89	100	100	100	100	100	100	
7	Nilai penjaminan kualitas SPIP	Angka	4,292	4,300	4,350	4,400	4,450	4,500	4,550	
8	Persentase kebijakan anti korupsi yang ditetapkan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi	%	87,92	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Level kapabilitas apip	Level	3	3	3	3	3	4	4	
12	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti	%	77,58	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				26.132.902.153,00		27.493.932.286,00		27.566.655.704,00		29.781.760.839,00		30.785.070.666,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.698.927.323,00		19.666.271.605,00		20.469.375.357,00		21.219.729.424,00		21.937.070.145,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	85,95	87	3.540.800,00	88	3.753.248,00	89	3.893.377,00	90	4.098.546,00	91	4.303.474,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.540.800,00		3.753.248,00		3.893.377,00		4.098.546,00		4.303.474,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.540.800,00	1	3.753.248,00	1	3.893.377,00	1	4.098.546,00	1	4.303.474,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				572.800,00		607.168,00		631.455,00		663.027,00		696.179,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	572.800,00	2	607.168,00	2	631.455,00	2	663.027,00	2	696.179,00		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				558.000,00		591.480,00		615.139,00		645.896,00		678.191,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	558.000,00	1	591.480,00	1	615.139,00	1	645.896,00	1	678.191,00		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				558.000,00		591.480,00		615.139,00		645.896,00		678.191,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	558.000,00	1	591.480,00	1	615.139,00	1	645.896,00	1	678.191,00		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				298.000,00		315.880,00		328.515,00		344.941,00		362.188,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	298.000,00	1	315.880,00	1	328.515,00	1	344.941,00	1	362.188,00		
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				298.000,00		315.880,00		328.515,00		344.941,00		362.188,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	298.000,00	1	315.880,00	1	328.515,00	1	344.941,00	1	362.188,00		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				758.000,00		803.480,00		825.619,00		877.400,00		921.270,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	758.000,00	2	803.480,00	2	825.619,00	2	877.400,00	2	921.270,00		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				498.000,00		527.880,00		548.995,00		576.445,00		605.267,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	498.000,00	4	527.880,00	4	548.995,00	4	576.445,00	4	605.267,00		
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas apip (Level)	3	3	18.695.386.523,00	3	19.662.518.357,00	3	20.465.481.980,00	4	21.215.630.878,00	4	21.932.766.671,00		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.696.607.795,00		11.338.368.263,00		11.791.940.434,00		12.381.537.454,00		13.000.614.327,00		
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	10.696.607.795,00	2	11.338.368.263,00	2	11.791.940.434,00	2	12.381.537.454,00	2	13.000.614.327,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		40		40		40		40					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	40		40		40		40					
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.573.621.295,00		11.208.038.573,00		11.656.360.116,00		12.239.178.121,00		12.851.137.027,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	40	10.573.621.295,00	40	11.208.038.573,00	40	11.656.360.116,00	40	12.239.178.121,00	40	12.851.137.027,00		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		40	738.300,00	40	782.598,00	40	813.902,00	40	854.597,00	40	897.327,00		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				106.400.000,00		112.748.000,00		117.295.360,00		123.160.128,00		129.318.134,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	106.400.000,00	12	112.748.000,00	12	117.295.360,00	12	123.160.128,00	12	129.318.134,00		
6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		12	738.300,00	12	782.598,00	12	813.902,00	12	854.597,00	12	897.327,00		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.195.000,00		5.506.700,00		5.726.968,00		6.013.316,00		6.313.982,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.195.000,00	1	5.506.700,00	1	5.726.968,00	1	6.013.316,00	1	6.313.982,00		
6.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	738.300,00	2	782.598,00	2	813.902,00	2	854.597,00	2	897.327,00		
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.995.000,00		5.294.700,00		5.506.488,00		5.781.812,00		6.070.903,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		12	4.995.000,00	12	5.294.700,00	12	5.506.488,00	12	5.781.812,00	12	6.070.903,00		
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.181.600,00		4.432.496,00		4.609.796,00		4.840.286,00		5.082.300,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1	4.181.600,00	1	4.432.496,00	1	4.609.796,00	1	4.840.286,00	1	5.082.300,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.938.700,00		7.355.022,00		7.649.223,00		8.031.684,00		8.433.269,00		
Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	6.938.700,00	1	7.355.022,00	1	7.649.223,00	1	8.031.684,00	1	8.433.269,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1			
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00		
6.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00		
6.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00		
6.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00		
6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.247.200,00		3.442.032,00		3.579.713,00		3.758.699,00		3.946.634,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	3.247.200,00	1	3.442.032,00	1	3.579.713,00	1	3.758.699,00	1	3.946.634,00		
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.445.531.717,00		2.442.837.735,00		2.605.386.339,00		2.635.655.657,00		2.502.418.028,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	54	54	2.445.531.717,00	54	2.442.837.735,00	54	2.605.386.339,00	54	2.635.655.657,00	54	2.502.418.028,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		40		40		40		40		40			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40	40		40		40		40		40			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				86.873.500,00		92.085.910,00		95.769.346,00		100.557.814,00		105.585.704,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	54	54	86.873.500,00	54	92.085.910,00	54	95.769.346,00	54	100.557.814,00	54	105.585.704,00		
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		40	738.300,00	40	782.598,00	40	813.902,00	40	854.597,00	40	897.327,00		
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				83.678.400,00		88.699.104,00		92.247.068,00		96.859.422,00		101.702.393,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	40	40	83.678.400,00	40	88.699.104,00	40	92.247.068,00	40	96.859.422,00	40	101.702.393,00		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.041.868.705,00		1.229.379.869,00		1.278.555.064,00		1.242.482.817,00		1.409.606.958,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40	40	1.041.868.705,00	40	1.229.379.869,00	40	1.278.555.064,00	40	1.242.482.817,00	40	1.409.606.958,00		
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.232.372.812,00		1.031.890.254,00		1.138.000.959,00		1.194.901.007,00		884.625.646,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	1.232.372.812,00	40	1.031.890.254,00	40	1.138.000.959,00	40	1.194.901.007,00	40	884.625.646,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.957.912.319,00		3.135.387.058,00		3.215.812.540,00		3.207.752.528,00		3.293.789.375,00		
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	2.957.912.319,00	12	3.135.387.058,00	12	3.215.812.540,00	12	3.207.752.528,00	12	3.293.789.375,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.615.400,00		36.692.324,00		38.160.017,00		40.068.018,00		42.071.419,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	34.615.400,00	2	36.692.324,00	2	38.160.017,00	2	40.068.018,00	2	42.071.419,00		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				103.921.600,00		110.156.896,00		114.563.172,00		120.291.330,00		126.305.897,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	103.921.600,00	12	110.156.896,00	12	114.563.172,00	12	120.291.330,00	12	126.305.897,00		
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.908.900,00		10.503.434,00		10.923.571,00		11.469.750,00		12.043.237,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	9.908.900,00	12	10.503.434,00	12	10.923.571,00	12	11.469.750,00	12	12.043.237,00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				618.749.540,00		655.874.512,00		682.109.493,00		716.214.968,00		752.025.716,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	618.749.540,00	12	655.874.512,00	12	682.109.493,00	12	716.214.968,00	12	752.025.716,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				60.953.200,00		64.610.392,00		67.194.808,00		70.554.548,00		74.082.275,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	60.953.200,00	12	64.610.392,00	12	67.194.808,00	12	70.554.548,00	12	74.082.275,00		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				61.054.300,00		64.717.558,00		67.306.260,00		70.671.573,00		74.205.152,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	61.054.300,00	12	64.717.558,00	12	67.306.260,00	12	70.671.573,00	12	74.205.152,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.052.797.650,00		2.175.965.509,00		2.218.014.129,00		2.160.064.196,00		2.193.716.627,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	2.052.797.650,00	12	2.175.965.509,00	12	2.218.014.129,00	12	2.160.064.196,00	12	2.193.716.627,00		
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				738.300,00		782.598,00		813.902,00		854.597,00		897.327,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	738.300,00	1	782.598,00	1	813.902,00	1	854.597,00	1	897.327,00		
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.173.429,00		16.083.835,00		16.727.188,00		17.563.548,00		18.441.725,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	15.173.429,00	1	16.083.835,00	1	16.727.188,00	1	17.563.548,00	1	18.441.725,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.881.135.413,00		1.994.003.537,00		2.073.763.679,00		2.177.451.863,00		2.286.324.456,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		20	1.881.135.413,00	30	1.994.003.537,00	40	2.073.763.679,00	50	2.177.451.863,00	60	2.286.324.456,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	90	30		40		50		60		70			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		7		7		7		7		7			
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				191.500.000,00		202.990.000,00		211.109.600,00		221.665.080,00		232.748.334,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	191.500.000,00	1	202.990.000,00	1	211.109.600,00	1	221.665.080,00	1	232.748.334,00		
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.340.500.000,00		1.420.930.000,00		1.477.767.200,00		1.551.655.560,00		1.629.238.338,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		7	1.340.500.000,00	7	1.420.930.000,00	7	1.477.767.200,00	7	1.551.655.560,00	7	1.629.238.338,00		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				90.242.973,00		95.657.551,00		99.483.853,00		104.458.046,00		109.680.948,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		20	90.242.973,00	30	95.657.551,00	40	99.483.853,00	50	104.458.046,00	60	109.680.948,00		
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				258.892.440,00		274.425.986,00		285.403.026,00		299.673.177,00		314.656.836,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	90	30	258.892.440,00	40	274.425.986,00	50	285.403.026,00	60	299.673.177,00	70	314.656.836,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.617.461,00		258.234.509,00		268.563.890,00		281.992.084,00		296.091.687,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	243.617.461,00	12	258.234.509,00	12	268.563.890,00	12	281.992.084,00	12	296.091.687,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.365.281,00		7.807.198,00		8.119.486,00		8.525.460,00		8.951.733,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	7.365.281,00	12	7.807.198,00	12	8.119.486,00	12	8.525.460,00	12	8.951.733,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				154.080.680,00		163.325.521,00		169.858.542,00		178.351.469,00		187.269.042,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	154.080.680,00	12	163.325.521,00	12	169.858.542,00	12	178.351.469,00	12	187.269.042,00		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				82.171.500,00		87.101.790,00		90.585.862,00		95.115.155,00		99.870.912,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	82.171.500,00	12	87.101.790,00	12	90.585.862,00	12	95.115.155,00	12	99.870.912,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				463.643.118,00		486.332.233,00		502.365.875,00		523.209.608,00		545.095.529,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	463.643.118,00	1	486.332.233,00	1	502.365.875,00	1	523.209.608,00	1	545.095.529,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	90		95		100		105		110			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				108.753.550,00		115.278.763,00		119.889.914,00		125.884.409,00		132.178.630,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	108.753.550,00	1	115.278.763,00	1	119.889.914,00	1	125.884.409,00	1	132.178.630,00		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				217.791.800,00		230.859.308,00		240.093.680,00		252.098.364,00		264.703.283,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	217.791.800,00	1	230.859.308,00	1	240.093.680,00	1	252.098.364,00	1	264.703.283,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.606.568,00		54.702.962,00		56.891.081,00		59.735.635,00		62.722.416,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	90	51.606.568,00	95	54.702.962,00	100	56.891.081,00	105	59.735.635,00	110	62.722.416,00		
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				85.491.200,00		85.491.200,00		85.491.200,00		85.491.200,00		85.491.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00	1	85.491.200,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5.723.641.550,00		6.014.707.404,00		6.220.393.940,00		6.487.786.436,00		6.768.548.559,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (%)	77,58	100	5.723.641.550,00	100	6.014.707.404,00	100	6.220.393.940,00	100	6.487.786.436,00	100	6.768.548.559,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				4.580.917.620,00		4.855.772.678,00		5.050.003.585,00		5.302.503.763,00		5.567.628.953,00		
Terlaksananya PKPT	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)		1	4.580.917.620,00	1	4.855.772.678,00	1	5.050.003.585,00	1	5.302.503.763,00	1	5.567.628.953,00		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	12	17		19		21		23		25			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	82	82		82		82		82		82			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	40	40		40		40		40		40			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	22	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	82	82		82		82		82		82			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1.574.994.260,00		1.669.493.916,00		1.736.273.672,00		1.823.087.356,00		1.914.241.724,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	82	82	1.574.994.260,00	82	1.669.493.916,00	82	1.736.273.672,00	82	1.823.087.356,00	82	1.914.241.724,00		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				734.636.950,00		778.715.167,00		809.863.774,00		850.356.962,00		892.874.810,00		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	40	40	734.636.950,00	40	778.715.167,00	40	809.863.774,00	40	850.356.962,00	40	892.874.810,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				469.911.830,00		498.106.540,00		518.030.801,00		543.932.341,00		571.128.959,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	12	17	469.911.830,00	19	498.106.540,00	21	518.030.801,00	23	543.932.341,00	25	571.128.959,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				226.600.280,00		240.196.297,00		249.804.149,00		262.294.356,00		275.409.074,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	2	2	226.600.280,00	2	240.196.297,00	2	249.804.149,00	2	262.294.356,00	2	275.409.074,00		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				750.783.690,00		795.830.711,00		827.663.940,00		869.047.137,00		912.499.494,00		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	22	12	750.783.690,00	12	795.830.711,00	12	827.663.940,00	12	869.047.137,00	12	912.499.494,00		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				226.600.280,00		240.196.297,00		249.804.149,00		262.294.356,00		275.409.074,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)		1	226.600.280,00	1	240.196.297,00	1	249.804.149,00	1	262.294.356,00	1	275.409.074,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				597.390.330,00		633.233.750,00		658.563.100,00		691.491.255,00		726.065.818,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	82	82	597.390.330,00	82	633.233.750,00	82	658.563.100,00	82	691.491.255,00	82	726.065.818,00		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				1.142.723.930,00		1.158.934.726,00		1.170.390.355,00		1.185.282.673,00		1.200.919.606,00		
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	1	1.142.723.930,00	1	1.158.934.726,00	1	1.170.390.355,00	1	1.185.282.673,00	1	1.200.919.606,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	19	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian				270.179.930,00		286.390.726,00		297.846.355,00		312.738.673,00		328.375.606,00		
Negara/Daerah														
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	1	270.179.930,00	1	286.390.726,00	1	297.846.355,00	1	312.738.673,00	1	328.375.606,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				872.544.000,00		872.544.000,00		872.544.000,00		872.544.000,00		872.544.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	19	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00	12	872.544.000,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.710.333.280,00		1.812.953.277,00		876.886.407,00		2.074.244.979,00		2.079.451.962,00		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan (%)	100	100	1.710.333.280,00	100	1.812.953.277,00	100	876.886.407,00	100	2.074.244.979,00	100	2.079.451.962,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				29.404.020,00		31.168.261,00		32.414.991,00		34.035.741,00		35.737.529,00		
Terlaksanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	29.404.020,00	1	31.168.261,00	1	32.414.991,00	1	34.035.741,00	1	35.737.529,00		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1				1		1		1			
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				27.246.020,00		28.880.781,00		30.036.012,00		31.537.813,00		33.114.704,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	27.246.020,00	1	28.880.781,00	1	30.036.012,00	1	31.537.813,00	1	33.114.704,00		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				2.158.000,00		2.287.480,00		2.378.979,00		2.497.928,00		2.622.825,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	1	2.158.000,00	1	2.287.480,00	1	2.378.979,00	1	2.497.928,00	1	2.622.825,00		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.680.929.260,00		1.781.785.016,00		844.471.416,00		2.040.209.238,00		2.043.714.433,00		
Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	5	1.680.929.260,00	5	1.781.785.016,00	5	844.471.416,00	5	2.040.209.238,00	5	2.043.714.433,00		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan dan Daerah (perangkat daerah)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				138.593.060,00		146.908.644,00		152.784.989,00		160.424.239,00		168.445.451,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	12	12	138.593.060,00	12	146.908.644,00	12	152.784.989,00	12	160.424.239,00	12	168.445.451,00		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				190.032.000,00		201.433.920,00		209.491.277,00		219.965.841,00		230.064.133,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	18	18	190.032.000,00	18	201.433.920,00	18	209.491.277,00	18	219.965.841,00	18	230.064.133,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1.107.265.200,00		1.173.701.112,00		122.064.156,00		1.281.681.614,00		1.345.160.428,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	5	1.107.265.200,00	5	1.173.701.112,00	5	122.064.156,00	5	1.281.681.614,00	5	1.345.160.428,00		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				245.039.000,00		259.741.340,00		360.130.994,00		378.137.544,00		300.044.421,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6	6	245.039.000,00	6	259.741.340,00	6	360.130.994,00	6	378.137.544,00	6	300.044.421,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat				
1.	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			6.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			6.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat									
2.	Nilai SAKIP	poin	71	72,95	74,90	76,85	78,80	80,75	82,70	
3.	Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman	%	89	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai penjaminan kualitas SPIP	Angka	4,292	4,300	4,350	4,400	4,450	4,500	4,550	
5.	Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase IKK sesuai pedoman	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase kebijakan anti korupsi yang ditetapkan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A	%	33,33	90	92	94	96	98	100	
9.	Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi	%	87,92	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Indeks Maturitas SPIP	positif	Nilai	3,15	3,25	3,34	3,42	3,51	3,60	3,69	
3.	Survey Penilaian Integritas	positif	poin	72,47	73,78	75,09	76,40	77,71	79,02	80,34	
4.	Persentase IKK sesuai pedoman	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase kebijakan anti korupsi yang ditetapkan sesuai rencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase ketepatan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase pemenuhan dokumen MCP sesuai pedoman		%	89	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase SKPD yang mendapatkan nilai SAKIP minimal A		%	33,33	90	92	94	96	98	100	
9.	Nilai penjaminan kualitas SPIP	positif	Angka	4,292	4,300	4,350	4,400	4,450	4,500	4,550	
10.	Persentase capaian target rencana aksi reformasi birokrasi	positif	%	87,92	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase tindak lanjut hasil pendampingan dan asistensi yang diselesaikan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti		%	77,58	100	100	100	100	100	100	
13.	Level kapabilitas apip		Level	3	3	3	3	3	4	4	